

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA UPTD

SAMSAT KABUPATEN SIDRAP

Diajukan Oleh

HARDIYANTI

4518012040



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PRODI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA UPTD
SAMSAT KABUPATEN SIDRAP

Nama Mahasiswa : Hardiyanti

Stanbuk/NIM : 4518012040

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen Keuangan

Tempat Penelitian : Kantor UPTD SAMSAT Kabupaten Sidrap



Dr.H. Muhammad Yusuf Saleh, SE.,MSi Dr. Hj. Herminawati AB, SE.,M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa



Dr.Hj. Herminawati AB, SE.,MSI.

Ketua Program Studi
Manajemen



Signature of Ahmad Jumarding, SE.,MM

Ahmad Jumarding, SE.,MM

Tanggal Pengesahan: 19 Agustus 2022

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARDIYANTI
Nim : 4518012040
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada UPTD
SAMSAT kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naska skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya suatu pendapatan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa pelaksanaan sama sekali.

Makassar, 15 Agustus 2022



Hardiyanti

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA UPTD SAMSAT KABUPATEN SIDRAP

Oleh :

HARDIYANTI

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universita Bosowa

ABSTRAK

HARDIYANTI.2022.Skripsi.Analisis Kinerja Keuangan Pada UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap dibimbing oleh Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE.,M.SI. dan ibu Dr. Hj. Herminawati AB, SE.,M.SI.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada UPTD SAMSAT dan bagaimana efektifitas pada kinerja keuangan pada UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan dari hasil peelitian ini dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan, pada UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap tahun Anggaran 2019 – 2021 terjadi fluktualis kenaikan dan penurunan.

Kata Kunci : kinerja keuangan pada UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AT UPTD SAMSAT,
SIDRAP REGENCY**

By :

HARDYANTI

Management Study Program, Faculty of Economics and Business

University of Bosowa

ABSTRACT

HARDIYANTI.2022.Thesis.Analysis of Financial Performance at UPTD SAMSAT, Sidrap Regency. Supervised by Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE., M.SI. and mother Dr. Hj. Herminawati AB, SE., M.SI.

The purpose of this study was to determine how the financial performance of the UPTD SAMSAT and how the effectiveness of the financial performance of the UPTD SAMSAT Sidrap district.

This study uses financial ratio analysis consisting of the ratio of regional financial independence, effectiveness ratio, and growth ratio.

Based on the results of this research, it can be concluded that the ratio of regional financial independence, effectiveness ratio, and growth ratio, in the UPTD SAMSAT Sidrap district for the 2019-2021 Fiscal year, fluctuating increases and decreases.

Keywords: financial performance at UPTD SAMSAT Sidrap

Kata Pengantar

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis hanturkan kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan karuniainya, dan teriring salam dan shalawat yang tcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada fakultas ekonomi jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “ ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA UPTD SAMSAT KABUPATEN SIDRAP ”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesikannya skripsi ini.

1. Pertama – tama, ucapan penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.,M.SI.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawati AB, SE.,M.SI. Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Idrayani Nur,S.Pd.,SE.,MSI. Selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Ahmad Jumarding,SE.,MM. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Kepada bapak Dr. H. Muhammad Saleh Yusuf, SE.,M.SI dan ibu Dr. Hj. Herminawati AB, SE.,M.SI. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi – diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah.

Beserta staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.

7. Bapak H. Hasanuddin,SE. selaku kepala seksi pendapatan dan penerimaan UPT SAMSAT Kabupaten Sidrap beserta stafnya, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor Samsat.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Aamiin ya rabbal alaamiin.

Makassar, 15 Agustus 2022

Hardiyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KOERSINILAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kerangka Teori.....	8
2.1.1 Manajemen Keuangan.....	8
2.1.2 Pengertian Kinerja Keuangan	9
2.1.3 Analisis Kinerja Keuangan	10
2.1.4 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	12
2.1.5 Pengertian Laporan Keuangan	13
2.1.6 Analisis Laporan Keuangan	14
2.1.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
2.1.8 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah	15
2.1.9 Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	17

2.1.10Laporan Keuanga Pemerintah Daerah	19
2.1.11Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Derah	24
2.1.12Pengertian Rasio Keuangan	27
2.1.13Jenis Rasio Keuangan	28
2.2.1 Kerangka Fikir	29
2.2.2 Hipotesis.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3.1 Jenis Data	33
3.3.2 Sumber Data.....	34
3.4 Populasi Dan Sampel	35
3.5 Metode Analisi Data	35
3.6 Definisi Operasional.....	36
3.7 Jadwal Penelitian.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Perusahaan.....	39
4.2 Deskripsi Data.....	45
4.3 Analisis Data	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....64

LAMPIRAN



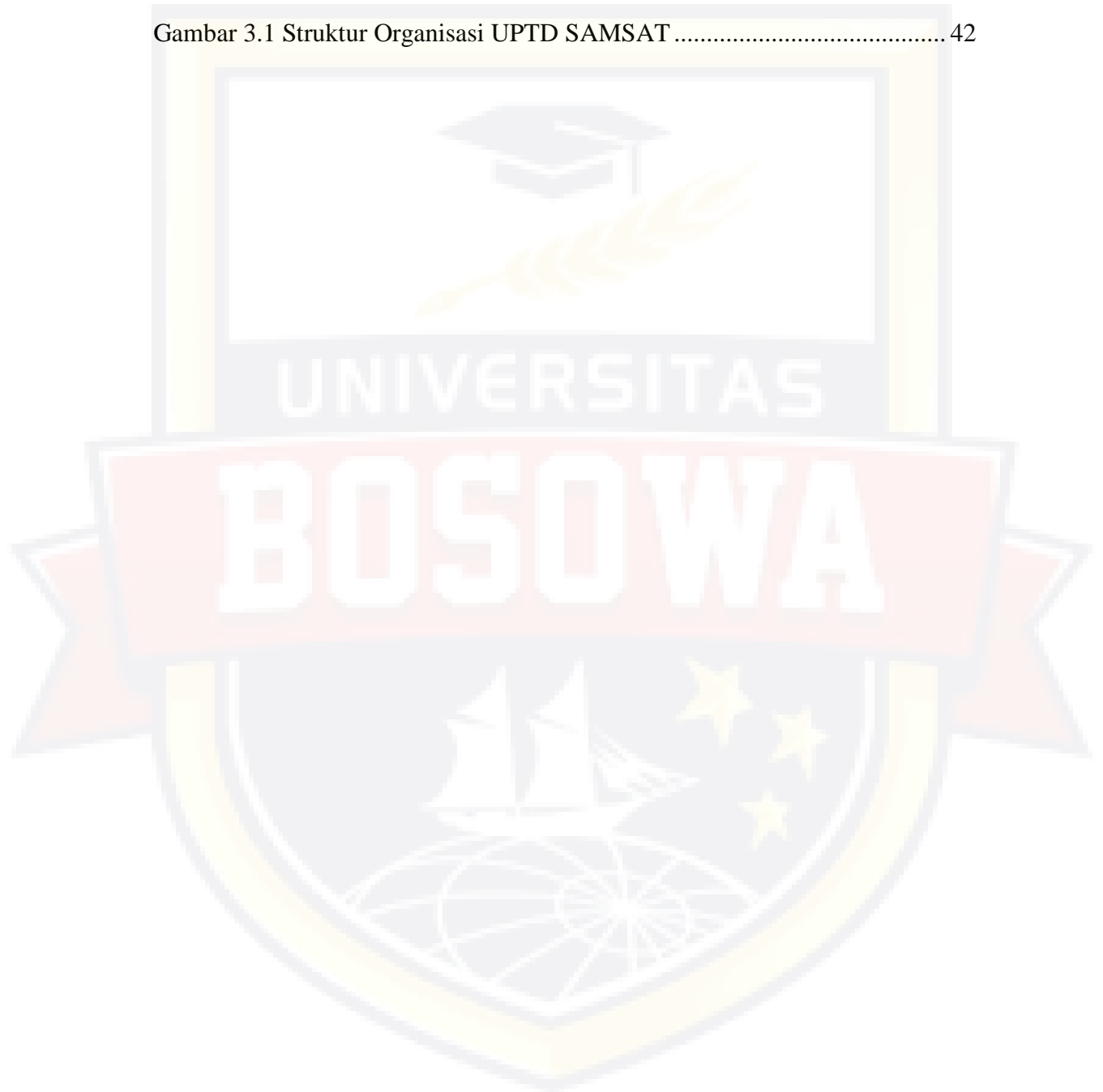
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pemungutan Pajak.....	46
Tabel 4.2 Pemungutan Pajak.....	47
Tabel 4.3 Pemungutan Pajak.....	48
Tabel 4.4 Pemungutan Pajak.....	49
Tabel 4.5 Kreteria Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	50
Tabel 4.6 kreteria Kinerja Keuangan Rasio Efektifitas	53
Tabel 4.7 Kreteria Kinerja Keuangan Rasio Pertumbuhan.....	54
Tabel 4.8 Rekapitulasi Rasio Keuangan Daerah.....	56

TABEL GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir..... 30

Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPTD SAMSAT 42



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian nasional saat ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi pajak. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi pajak, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pajak, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

UPTD. Dinas Pendapatan Daerah (SAMSAT) Kabupaten Sidrap adalah sebuah institusi perusahaan milik Pemerintah Negara dan Daerah, di Indonesia. Dimana perusahaan ini merupakan unit pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Perusahaan ini akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan membayar pajak, agar wajib pajak kendaraan merasa terlayani dengan baik.

Dengan adanya Kantor Samsat di Kabupaten Sidrap, akan lebih mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. UPTD Dinas Pendapatan Daerah (SAMSAT) Kabupaten Sidrap ini adalah perusahaan yang pertama dan terpusat yang ada di Kabupaten Sidrap. Perusahaan ini didirikan pada 1 April 2004 di Pangkajene Kabupaten Sidrap.

Berdirinya Kantor SAMSAT ditujukan sebagai pelaksana dengantugas membuat atau merancang konsep-konsep untuk memberdayakan segalakemampuan agar dapat melaksanakan tugas dalam Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) secara efektif dengan tujuan antara lain, sebagai usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan khusus nya di Kabupaten Sidrap dan meningkatkan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan melalui penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor(PKB) dan penerimaan dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Disamping itu tujuan nya untuk meningkatkan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan melalui penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Kota Makassar yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban, dan kelancaran pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling

tinggi sebesar 20%. Yang disebabkan karena kurang efektifnya pendapatan daerah.

Mengingat pentingnya Pajak dalam peningkatan perekonomian Indonesia tentu itu menjadi acuan utama dalam menentukan penelitian maka peneliti mengambil judul: “ **Analisis Kinerja Keuangan pada UPTD SAMSAT Kabupaten Sidrap** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan yakni :

Bagaiman kinerja keuangan pada UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kabupaten Sidrap
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas kinerja keuangan pada Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan Analisis Kinerja Keuangan pada Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap.

Berikut beberapa manfaat peneliti yang dapat di kontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pihak perusahaan khususnya bagi pihak manajemen keuangan Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) dalam pengambilan keputusan dan kebijakan berdasarkan perbandingan analisis kinerja keuangan dimasa pandemi covid – 19 dan Era New Normal.

2. Bagi Karyawan

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberi pengetahuan lebih banyak kepada karyawan dalam bekerja di sebuah perusahaan agar hasil dengan kelompok dapat lebih baik.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai informasi dalam menganalisis sebuah laporan keuangan UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap.

4. Bagi Pihak lain

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan referensi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar, sebagai acuan penelitian selanjutnya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Manajemen Keuangan

Pengertian Manajemen Keuangan

Pada dasarnya manajemen keuangan merupakan proses aktivitas keuangan, dimana terdiri dari perencanaan, pengendalian, serta penganalisan terhadap laporan keuangan.

Menurut Martono dan Harjito (dalam Nevi Paula Anggraeni, 2020), manajemen keuangan merupakan beberapa aktivitas instansi berkaitan dengan cara mendapatkan sebuah dana, serta mengatur aset yang dimiliki instansi secara menyeluruh.

Menurut Sudana (dalam Nevi Paula Anggraeni, 2020) manajemen keuangan merupakan sektor keuangan yang menekankan pada konsep keuangan pada instansi dalam mewujudkan serta menetapkan sebuah keputusan dan mengstur sumber daya dengan baik. Sehingga manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas organisasi perusahaan dalam bidang keuangan yang berhubungan dengan persoalan pendanaan, pengelolaan, pengendalian, penganalisan terhadap sumber daya yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat.

Disisi lain manajemen dalam sebuah organisasi terbagi atas 3 fungsi pokok utama, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai keputusan investasi
2. Sebagai keputusan pendanaan
3. Sebagai keputusan pengelolaan aktiva.

Adapun tujuan dari manajemen keuangan bagi perusahaan yaitu untuk mengatur keuntungan dan biaya – biaya yang di keluarkan oleh pihak perusahaan dengan cara pengambilan keputusan yang terbaik guna untuk perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

2.1.2 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2018), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan – aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.

Menurut Isna dan Ayu (2015) kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintah, sejak di terapkannya penggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat memperhatikan efektifitas, efesiensi dan ekonomis.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa kinerja merupakan hasil kerja atau perbandingan sacara kualitas dan kuantitas baik yang bersifat fisik maupun mental, fisik atau non mental, gambaran kondisi

keuangan perusahaan baik menyangkut penghimpunan dan penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam meningkatkan perusahaan.

Menurut Hasibuan (2016), kinerja keuangan adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya.

Menurut Sutrisno (2016) kinerja adalah sebagai hasil yang telah dicapai seseorang dari tingkah kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Karyawan dapat bekerja dengan baik bila memiliki kinerja tinggi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik pula.

2.1.3 Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Hery (2015) berdasarkan tekniknya terdapat 9 macam analisis kinerja keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan

Analisis perbandingan laporan keuangan yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan jumlah (*absolute*) maupun dalam presentase (*relative*).

2. Analisis Tren

Analisis tren merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.

3. Analisis Presentase Per Komponen

Analisis Presentase Per Komponen merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui presentase masing – masing komponen aset terhadap total aset, presentase masing – masing komponen utang dan modal terhadap total passiva, presentase masing – masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih.

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan.

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Analisis sumber dan penggunaan kas merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.

6. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan diantara akun – akun yang tercantum dalam neraca maupun laporan laba rugi.

7. Analisis Perubahan Laba Kotor

Analisis perubahan laba kotor yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode

ke periode berikutnya serta sebab – sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut.

8. Analisis Titik Impas

Analisis titik impas merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perubahan tidak mengalami kerugian.

9. Analisis Kredit

Analisis kredit merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitur kepada kreditor, seperti Bank.

2.1.4 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengalih dan mengelolah sumber – sumber asli keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pemebangunan daerahnya.

Menurut Sumarjo (2010 : 18), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari kegiatan yang akan di capai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah

ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

2.1.5 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Toto Prihadi (2019), laporan keuangan merupakan perolehan berdasarkan aktivitas catatan hasil transaksi keuangan instansi. Transaksi keuangan yang dimaksud adalah berbagai jenis aktivasi bisa mempengaruhi keadaan *finansial* instansi.

Perusahaan yang besar dalam mengelola pelaporan keuangan, pihak instansi biasanya melakukan pada tanggal yang telah di tentukan. Ada beberapa tahap pada pelaporan keuangan yang bisanya dilakukan oleh prusahaan publik, yaitu :

1. Laporan triwulan 1 ;
2. Laporan triwulan 2 ;
3. Laporan triwulan 3 ;
4. Laporan akhir tahun.

Menurut (Hery dalam Hendy Widiastoeti dan Chatarina Agustin Endah Sari, 2020). Disisi lain, laporan keuangan nerupakan proses akuntansi yang dapat dipergunakan dalam menghubungkan pelaporan keuangan dengan kegiatan perusahaan yang penting. Sebab itu, laporan keuangan memiliki tujuan menyajikan secara wujud berdasarkan prinsip akuntansi umum mengenai laporan keuangan serta perolehan usaha.

Menurut Soemarto (khairul Aswar, 2020) laporan keuangan yang disajikan harus bersifat relevan dan tepat waktu, agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik perusahaan maupun pihak yang berkepentingan di luar perusahaan dalam menindak lanjuti keadaan perusahaan kedepannya. Laporan keuangan dapat di katakan tahap akhir dari siklus akuntansi.

2.1.6 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Hatauruk (2017) analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini, maka dapat dijelaskan dari arti masing – masing kata. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laba rugi dan arus kas. Jika dua pengertian ini digabungkan, analisis laporan keuangan berarti mengurai pos – pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non- kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

2.1.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah,

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

2.1.8 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh pemerintah daerah menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, dimana Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tersebut memiliki peranan yang penting dalam menyokong APBD dalam membiayai kegiatan rutin daerah dan pembangunan di daerah.

a. Pengertian Pajak Daerah dan Sistem Pemungutannya

Menurut Zain (2007 : 13) Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang terpenting dan besar pengaruhnya bagi income bagi daerah. “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
4. Pendapatan Denda

Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :

1. Pajak Hotel dan Restoran
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C”

b. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiansmo (2018 : 7) untuk mempermudah penghitungan dan pengumpulan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah mempunyai 2 (dua) cara sistem pemungutan pajak daerah antara lain :

1. Sistem Official Assessment

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem Self Assessment

Adalah mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan.

Ciri-cirinya : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, Wajib pajak aktif mulai dari menghitung menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.1.9 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah ordonansi pajak kendaraan bermotor tahun 1934 sebagaimana

beberapa kali telah diubah dan ditambah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Prp. Tahun 1959

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, pajak kendaraan bermotor diserahkan pada daerah Propinsi kemudian daerah Propinsi menetapkan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor dengan berpedoman pada ordonansi tersebut. Selanjutnya sehubungan dengan dilaksanakannya pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap (SAMSAT) maka dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor ditambah dengan peraturan-peraturan baru tentang SAMSAT. Daerah mengadakan dan memungut pajak atas kendaraan bermotor dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Sedangkan yang menjadi sasaran pungutan pajak kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang terdaftar sebagai kendaraan bermotor dengan yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak

Kendaraan Bermotor, pada pasal 4, yaitu dikecualikan dari obyek PKB kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Desa.
2. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
3. Pabrikasi atau milik Importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual dan tidak digunakan dalam lalu lintas bebas.
4. Turis Asing yang berada di Daerah untuk jangka waktu 60 hari.
5. Penguasaan kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai kendaraan pemadam kebakaran.
6. Pemungutan kendaraan bermotor yang disegel atau disita Negara.

Tarif Pajak Kendaraan

Menurut Kurniawan, Purwanto (2006 :99) tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar :

1. 1,5% untuk kendaraan bermotor yang bukan umum
2. 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan
3. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.

2.1.10 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, komponen – komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/ daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang di kelolah oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu periode pelaporan. Dalam permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah akuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi pihak pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemda.
2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemda.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan mau pun tahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

b. Neraca Menurut Soemarso (dalam Irmasari, 2017) neraca merupakan bagian laporan keuangan (financial) yang bisa memberikan sebuah informasi terkait aktivitas yang terdapat didalamnya serta pengeluaran atas pembelian yang lakukan perusahaan. Laporan ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Masing – masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset (Assets)

Ikatan Akuntansi Indonesia (dalam Irmasari, 2017) berpendapat bahwa aset adalah elemen penting yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari permasalahan pada masa sebelumnya dan dari mana manfaat ekonomipada masa yang akan datang sesuai harapan yang akan diperoleh perusahaan.

2. Kewajiban (Liabilities)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (dalam Irmasari, 2017) kewajiban merupakan utang instansi yang terjadi karena peristiwa pada masa sebelumnya dan berdampak bagi arus kas keluar dari sumber daya insatansi yang memiliki manfaat ekonomi.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemda.

c. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi

anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang di gunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan di anjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan, laporan keuangan terdiri dari hal – hal sebagai berikut :

1. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal dan pencapaian target pada APBD, serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan - kebijakan akuntansi yang di pilih untuk diterapkan atas transaksi dan kebijakan – kebijakan penting lainnya.
4. Menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan sebelum melakukan penyusunan ataupun analisis, perlu diperlihatkan keterbatasan laporan keuangan. Setidaknya setelah

mengetahui keterbatasan – keterbatasan tersebut, kita menjadi lebih berhati – hati sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Apalagi analisis yang didasarkan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, keterbatasan laporan keuangan harus selalu diingat agar tidak terjadi kesalahan dalam menyimpulkan hasil analisis. Keterbatasan – keterbatasan tersebut adalah :

- a. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Masing – masing pengguna memiliki kepentingan yang berbeda. Karena itu, informasi yang disajikan harus dapat digunakan semua pihak.
- b. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai laporan mengenai segala waktu.
- c. Analisis laporan keuangan tidak cukup hanya dengan menilai angka – angka, akan tetapi juga perlukan mencermati aspek lain, seperti situasi ekonomi, budaya masyarakat, kondisi daerah dan lain – lain.
- d. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan.
- e. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.

Neraca laporan realisasi anggaran dan laporan sumbu dan penggunaan dana atau laporan arus kas mempunyai hubungan yang sangat erat. Angka – angka yang ada di dalamnya saling berkaitan.

Informasi yang terbaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan dalam ketika pengguna melakukan analisis. Hubungan suatu perkiraan dengan perkiraan yang lain dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan suatu daerah serta menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan keuangan. Untuk itu, cermati hubungan antara suatu perkiraan dengan perkiraan lain yang terdapat dalam laporan keuangan. Kita bahkan bisa mengkaitkannya dengan fenomena ekonomi yang sedang berlangsung.

2.1.11 Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam APBD statement No.4 dijelaskan beberapa prinsip atau sifat dan elemen dasar dari akuntansi (keuangan). Prinsip – prinsip ini mendasari setiap sifat dan ciri laporan keuangan dan output akuntansi lainnya. Prinsip itu adalah sebagai berikut :

1. Entitas (*Accounting Entity*)

Fokus perhatian akuntansi adalah entitas atau lembaga tertentu yang akan di laporkan, bukan lembaga lainnya.

2. Pengukuran (*Measurement*)

Akuntansi merupakan media pengukuran sumber – sumber ekonomi (*Economic resource*) dan kewajiban (*liability*). Akuntansi harus mengukur hasil transaksi dan ukuran yang di pakai adalah unit moneter.

3. Periode waktu (*Time Period*)

Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau periode tertentu. Laporan harus memiliki batas waktu yang jelas.

4. Unit Moneter (*Monetary Unit*)

Pengukuran setiap transaksi dilakukan dalam bentuk nilai atau unit uang.

5. Accrual

Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta, kewajiban ditetapkan berdasarkan kejadiannya, tanpa melihat transaksi atau penerimaan kas telah dilakukan atau belum.

6. Harga Pertukaran (*Exchange Price*)

Nilai dalam laporan keuangan didasarkan harga pertukaran ketika terjadi transaksi.

7. Penaksiran (*Aproximation*)

Dalam akuntansi, kita tak dapat menghindari masalah penaksiran, seperti taksiran umur, taksiran harga, pemilihan prinsip yang digunakan dan sebagainya.

8. Pertimbangan (*Judgement*)

Dalam menyusun laporan keuangan diperlukan berbagai pertimbangan berdasarkan keahlian, baik pertimbangan memilih alternatif prinsip maupun pemilihan cara penyajian laporan keuangan.

9. Bertujuan umum (*General Purpose*)

Dalam laporan keuangan ditujukan untuk umum, bukan pengguna khusus.

10. Laporan Terkait (*Internelated Statement*)

Neraca daftar laba/rugi dan laporan sumber penggunaan kas mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait.

11. Substance Over Form

Akuntansi lebih menekankan kenyataan ekonomis suatu kejadian dari pada bukti legal atau formalnya.

12. Materialisasi (*Materiality*)

Laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting.

Setiap pertimbangan dilakukan dengan tetap melihat signifikannya secara umum, indikat materialitas terkait dampaknya terhadap laporan keuangan.

2.1.12 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan atau *financial rati* merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan.

Menurut Wahyudiono (2014 : 10) laporan keuangan adalah laporan pertanggung jawaban manejer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya terhadap pihak – pihak luar perusahaan.

Menurut Harahap (2015 : 105) laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi informasi yang di pertanggungjawabkan oleh manajer atau pimpinan perusahaan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan informasi tersebut dapat di jadikan sebagai gambaran kinerja keuangan dari perusahaan tersebut.

2.1.13 Jenis Rasio Keuangan

Menurut Abdul Halim, (2007) pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Pendapatan transfer}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio pertumbuhan

Semakin banyaknya besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Pendapatan Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$$

Diketahui:

t1 = tahun awal

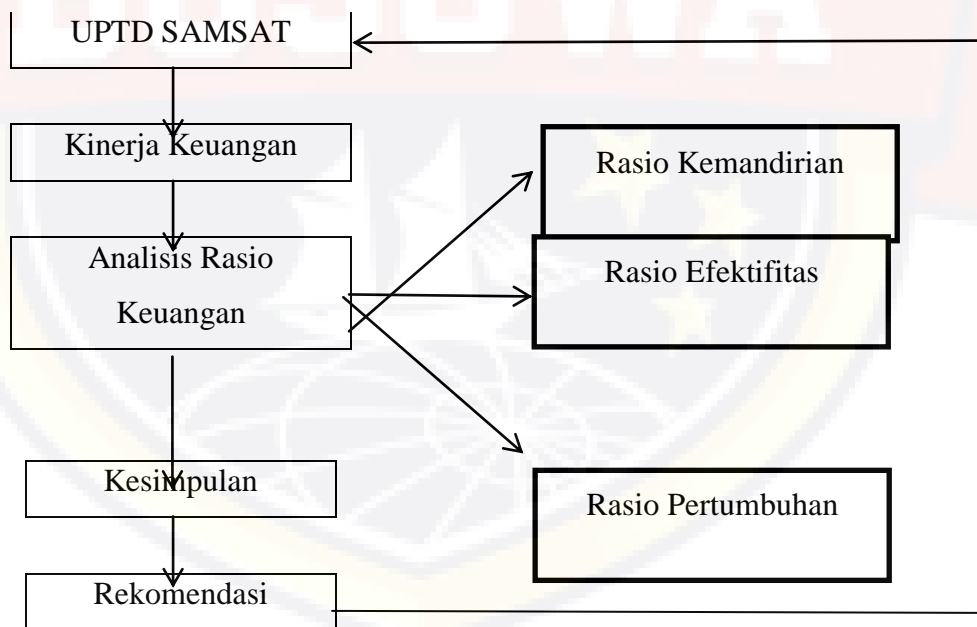
t0 = tahun akhir

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektivitas, kemampuan daerah pun semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah (Pemda).

2.2.1 Kerangka Pikir

Analisis kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Penulis menyimpulkan kerangka teorinya yaitu untuk mengukur kinerja keuangan analisis kinerja yang digunakan adalah rasio perhitungan anggaran, rasio efektifitas, rasio kemandirian keuangan daerah, guna untuk mencapai kinerja keuangan yang efektif. Bagan yang digunakan adalah.



Gambar 2.1

2.2.2 Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berfikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.

- Diduga bahwa kinerja keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kurang efektif. (efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan atau hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Yang terletak di Jln. Pacekke No. 07-09 Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian yang di rencanakan yaitu selama \pm 2 bulan, di mulai dari bulan Juni Tahun 2022 hingga Juli 2022.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas, metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian ini terdiri dari:

1) Observasi

Yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan pengamatan baik secara berhadapan langsung maupun secara

tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.

2) Wawancara

Yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan mewawancarai pihak – pihak yang bersangkutan dalam organisasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan materi pembhasan.

2. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu dengan mempelajari beberapa literature yang ada hubungannya dengan penulisan proposal, ini dilengkapi data yang diperoleh di lapangan serta untuk mendapatkan suatu kerangka teori yang akan dipakai sebagai bahan acuan berupa e-book, situs website, dan jurnal terdahulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Untuk mendapatkan informasi mengenai data yang relevan dengan asumsi penulisan proposal penelitian agar dapat lebih baik, maka penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu :

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk atau tersusun dari kata – kata. Data kualitatif diperoleh dengan mewawancarai, menganalisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka – angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif yang menunjukkan hasil pengukuran variabel untuk keperluan penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi yaitu di kanto UPTD SAMSAT Kabupaten Sidrap, tepatnya di Jalan Pacekke No 07-09 Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Melalui wawancara secara langsung kepada pihak kantor. Dalam penelitian wawancara dilakukan untuk memudahkan dalam mendefinisikan suatu data yang kemudian diolah dalam melakukan analisis data.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan – catatan dokumentasi, laporan, artikel – artikel, dan internet.

3.4 Populasi dan Sampel

Bagian ini menjelaskan wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun polulasi yang akan diambil disini adalah pegawai UPTD SAMSAT sebanyak 22 orang. sampel yang diambil dalam penelitian ini pada bagian keuagan UPTD SAMSAT sebanyak 1 orang melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah.

3.5 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis kinerja keuangan maka digunakan :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Pendapatan transfer}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas

Rasio eferktivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang di tergetkan.

Menurut Mahmudin (2010), Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio efektifitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio pertumbuhan

Semakin banyaknya besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Pendapatan Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t0} - \text{PAD}_{t1}}{\text{PAD}_{t0}}$$

Diketahui:

t1 = tahun awal

t0 = tahun akhir

3.6 Definisi Operasional

Dalam rangka pengumpulan data pengumpulan data yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut.
2. Kinerja keuangan adalah hasil kinerja yang dicapai oleh perusahaan yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan.
3. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain.
4. Rasio kemandirian adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.
5. Rasio efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
6. Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode.
7. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum kantor UPTD SAMSAT Kabupaten Sidrap

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor UPTD Sidrap

Kabupaten Sidenreng Rappang atau yang lebih akrab di singkat Sidrap . memiliki sejarah sebagai kerajaan Bugis yang cukup disegani di Sulawesi Selatan. Sejak abad XIV, disamping kerajaan Luwu, Bone, Gowa, Soppeng dan Wajo. Sejarah lainnya mencatat Sidenreng Rappang atau biasa di kenal dengan Kabupaten Sidrap merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Pangkajene dan terletak antara 3°43 - 4°09 lintang Selatan dan 119°41 - 120°10 Bujur Timur. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat utamanya kepada wajib pajak kendaraan bermotor, maka dibentuklah kantor cabang pembantu Pinrang (UPTD Wilayah Pinrang) yang membawahi samsat pembantu Sidrap dan samsat pembantu Enrekang. Seiring dengan semakin hari semakin meningkatnya perekonomian masyarakat yang akan membayar pajak dan dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten sidrap yang terbagi dalam 11 kecamatan dan 104 Desa / Kelurahan dengan luas 1883,25 KM² dengan jumlah penduduk sebanyak 255,499 jiwa penduduk.

Tahun di bentuknya kantor UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap yaitu pada tanggal 1 April 2004.

4.1.2 Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang maksimal melalui sistem pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel, dan inovatif.

b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13% per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun.
2. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efesiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayan pajak.
3. Mewujudkan aparatur laki – laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah.
4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

4.1.3 Struktur organisasi UPTD SAMSAT

Pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan sangat di tentukan oleh bentuk atau struktur organisasi dari perusahaan itu sendiri. Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap orang akan bekerja secara terarah dan terkendali. Struktur organisasi menggambarkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tercapai.

Apabila suatu perusahaan semakin berkembang, sudah tentu persoalan yang timbul juga semakin kompleks, sehingga tidak memungkinkan lagi diberlakukan sistem sentralisasi oleh karena tingkat pengewasan tidak akan memungkinkan lagi dapat dilakukan oleh satu orang, jika memang demikian, sebaiknya dilakukan desentralisasi dimana sebagian tanggung jawab dapat dilimpahkan kepada setiap unit yang dianggap perlu untuk dilakukan.

Untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi organisasi dapat dilihat pada stuktur organisasi UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap.



a. Kepala unit Pelaksana Teknis wilayah Sidrap

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala UPTD mempunyai 6 fungsi, yaitu sebagai berikut :

1. Pengordinasian pelaksana tugas
2. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian
3. Mengelola pendapatan
4. Pengordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data
5. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana
6. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang usahanya

b. Kepala Bagian Tata Usaha

Melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada dinas pendapatan daerah serta penyusunan laporan.

1. Menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bawahan.
2. Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana
3. Melaksanakan urusan administrasi umum
4. Melaksanakan urusan penyusunan laporan keuangan UPTD

5. Melaksanakan penatausahaan keuangan

c. Seksi pendapatan dan penetapan

Melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Dan pelaksanaan tugas pokok tersebut, kepala seksi pendapatan dan penetapan mempunyai beberapa tugas, yaitu :

1. Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi
2. Menyelenggarakan inventarisasi dataa potensi objek pajak daerah, pendapatan penginventarisasi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu
3. Membuat laporan hasil pendapatan dan penetapan setiap bulannya.

d. Seksi penagihan dan penerimaan

Melaksanakan sebagian tugas UPTD didalam bidang penagihan dan penerimaan yang dimaksud dalam tugas seksi penagihan dan penerimaan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
2. Menyiapkan surat penagihan surat teguran terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu
3. Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap bulan
4. Membuat laporan standar administrasi aplikasi perpajakan setiap bulannya

5. Melaksanakan tugas operasional pemeriksaan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) di jalan raya bekerja sama dengan instansi terkait.

4.2 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang berupa data dalam bentuk angka – angka. Dan sumber data yang digunakan data sekunder, yaitu data – data pendukung yang diperoleh dari dalam perusahaan atau di keluarkan oleh pihak internal yang ada kaitannya dengan masalah – masalah yang diteliti yakni laporan keuangan.

Berikut adalah hasil penelitian dari masing – masing rasio keuangan UPTD SAMSAT Kabupaten Sidrap.

a. Rasio Kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berikut adalah realisasi APBD UPTD SAMSAT kabupaten sidrap tahun anggaran 2019 sampai tahun 2021

Tabel 4.1

Gambaran Pemungutan Pajak UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap

Tahun 2019 – 2021

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Anggaran)	Realisasi	Peresentase kenaikan pertahun	Kriteria
2019	RP. 48.906.497.000	RP. 51.083.943.961	104,45%	Sangat efektif
2020	RP. 49.355.033.000	RP.50.531.549.420	102,38%	Sangat efektif
2021	RP. 57.617.566.000	RP.55.683.015.347	96,64%	efektif
Jumlah	Rp.155.879.096.000	Rp.157.298.508.728		

Sumber data : pajak pendapatan uptd samsat keb. Sidrap

Dari tabel 4.1 diketahui tahun 2019 anggaran pajak kendaraan bermotor Rp.48.906.497.000 dan raelisasinya Rp. 51.083.943.961. Tahun 2020 anggaran pajak kendaraan bermotor Rp.49.355.033.000 dan realisasinya Rp. 50.531.549.420. Tahun 2021 anggaran pajak kendaraan bermotor Rp. 57.617.566.000 dan realisasinya Rp. 55.683.015.347. Dari angka – angka realisasi APBD uptd samsat kabupaten sidrap tahun 2019 – 2020 dapat diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Tabel 4.2

Gambaran Pemungutan Pajak UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap

tahun 2019 – 2021

Tahun	Bealik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) (Anggaran)	Realisasi	Presentase kenaikan pertahun	Kreteria
2019	RP.37.543.209.000	RP.38.208.112.000	101,77%	Sangat efektif
2020	RP.26.512.216.000	RP.29.910.450.778	112,82%	Sangat efektif
2021	RP.39.446.202.000	RP.40.535.470.778	102,76%	Sangat efektif
Jumlah	Rp.103.501.627.000	Rp.108.654.033.556		

Sumber data : pajak pendapatan uptd samsat keb. Sidrap

Dari tabel 4.2 diketahui bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019 anggaran Rp. 37.543.209.000 dan realisasinya Rp. 38.208.112.000. Tahun 2020 anggaran bea balik nama kendaraan bermotor Rp. 26.512.216.000 dan realisasinya Rp. 29.910.450.778. Tahun 2021 anggaran bea balik nama kendaraan bermotor Rp. 39.446.202.000 dan realisasi nya Rp. 40.535.470.778. Dari angka – angka realisasi APBD uptd samsat kabupaten sidrap tahun 2019 – 2020 dapat

diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Tabel 4.3
Gambaran Pemungutan Pajak UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap
Tahun 2019 – 2021

Tahun	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (Anggaran)	Realiasi	Presentase kenaikan pertahun	Kreteria
2019	RP. 31.612.000	RP. 34.411.680	108,86%	Sangat efektif
2020	RP. 38.943.000	RP. 49.370.040	126,78%	Sangat efektif
2021	RP. 55.088.000	RP.57.715.336	104,77%	Sangat efektif
Jumlah	Rp. 125.643.000	Rp.141.497.056		

Sumber data : pajak pendapatan uptd samsat keb. Sidrap

Dari tabel 4.3 diketahui tahun 2019 anggaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Rp. 31.612.000 dan realisasi Rp. 34.411.680. Tahun 2020 anggaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Rp. 38.943.000 dan realisasinya Rp. 49.370.040. Tahun 2021 anggaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Rp. 55.088.000 dan realisasinya Rp. 57.715.336. Dari angka – angka realisasi APBD uptd samsat kabupaten sidrap tahun 2019 – 2020 dapat diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail.

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Tabel 4.4
Gambaran Pemungutan Pajak UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap
Tahun 2019 – 2021

Tahun	Pendapatan Denda Pajak (Anggaran)	Realiasi	Presentase kenaikan pertahun	Kreteria
2019	RP. 2.381.037.000	RP. 2.109.784.551	88,61%	Cukup efektif
2020	RP. 2.590.071.000	RP. 855.007.701	33,01%	Tidak efektif
2021	RP. 4.319.437.000	RP. 1.191.257.807	27,58%	Tidak efektif
Jumlah	Rp.9.290.545.000	Rp. 4.156.120.059		

Sumber data : pajak pendapatan uptd samsat keb. Sidrap

Tabel 4.4 diketahui tahun 2019 anggaran pendapatan denda pajak Rp. 2.381037.000 dan realisasinya Rp.2.109.784.551. Tahun 2020 anggaran pendapatan denda pajak Rp. 2.590.071.000 dan realisasinya Rp.855.007.701. Tahun 2021 anggaran pendapatan denda pajak Rp.4.319.437.000 dan realisasinya Rp. 1.191.257.807. Dari angka – angka realisasi APBD uptd samsat kabupaten sidrap tahun 2019 – 2020 dapat diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Berikut perhitungan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah)
UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap. Dengan menggunakan rasio kemandirian
keuangan daerah.

Rumus Yang Digunakan adalah :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Tabel 4.5

Kreteria Kinerja Kuangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kreteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang Dari 60%	Tidak efektif

Sumber data : depdagri, kepmendagri, tahun 2018

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 - 2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer
2019	Rp. 91.436.252.192	Rp.9.915.988.707
2020	Rp. 81.346.377.939	Rp. 9.261.696.100
2021	Rp. 97.467.459.268	Rp. 12.433.238.285

$$\text{RKKD Tahun Anggaran 2019} = \frac{91.436.252.192}{9.915.988.707} \times 100\% = 92\%$$

$$\text{RKKD Tahun Anggaran 2020} = \frac{\text{Rp. } 81.346.377.939}{\text{Rp. } 9.261.696.100} \times 100\% = 87\%$$

$$\text{RKKD Tahun Anggaran 2021} = \frac{\text{Rp. } 97.467.459.268}{\text{Rp. } 12.433.238.285} \times 100\% = 78\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap tahun anggaran 2019 sebesar 92%, berdasarkan kreteria pengukuran peandapatan UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap tahun 2018 maka rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2019 efektif, berbeda dengan tahun anggaran 2020 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan tetapi masih di kategorikan cukup efektif karena presentase anggarannya 87%, akan tetapi pada tahun anggaran 2021 presentasenya mengalami penurunan 78% dan di kategorikan kurang efektif.

b. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang di targetkan.

Menurut Mahmudin (2010), Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio efektifitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 - 2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Derah	Anggaran
2019	Rp. 91.436.252.192	Rp. 88.862.355.000
2020	Rp. 81.346.377.939	Rp. 78.496.263.000
2021	Rp. 97.467.459.268	Rp. 101.438.293.000

Tabel 4.6

Kreteria Kinerja Keuangan Rasio Efektifitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kreteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang Dari 60%	Tidak efektif

Sumber data : depdagri, kemendagri, tahun 2018

$$\text{Rasio Efektivitas tahun anggaran 2019} = \frac{\text{Rp. 91.436.252.192}}{\text{Rp. 88.862.355.000}} \times 100\% = 102\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas tahun anggaran 2020} = \frac{\text{Rp. 81.346.377.939}}{\text{Rp. 78.496.263.000}} \times 100\% = 103\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas tahun anggaran 2021} = \frac{\text{Rp. 97.467.459.268}}{\text{Rp. 101.438.293.000}} \times 100\% = 96\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio efektifitas UPTD Samsat kabupaten Sidrap tahun anggaran 2019 sebesar 102%, dan berdasarkan kreteria pengukuran pendapatan daerah tahun 2018 maka rasio efektifitas keuangan daerah tahun anggaran 2019 dapat dikategorikan sangat efektif, dan begitu pula dengan tahun anggaran 2020 rasio efektifitas keuangan mengalami

kenaikan sebesar 103% dan dapat dikategorikan sangat efektif, berbeda pada tahun anggaran 2021 rasio efektifitas mengalami penurunan yaitu 96% dan dikategorikan efektif.

c. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan untuk mengevaluasi potensi – potensi yang perlu mendapatkan perhatian.

Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PADt0} - \text{PADt1}}{\text{PADt0}}$$

Diketahui: t1 = tahun awal t0 = tahun akhir

Tabel 4.7

Kreteria Kinerja Keuangan Rasio Efektifitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kreteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang Dari 60%	Tidak efektif

Sumber data : depdagri, kepmendagri, tahun 2018

$$\text{Rasio Pertumbuhan 2019} = \frac{97.467.459.268 - 91.436.252.192}{97.467.459.268} = 62\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan 2020} = \frac{97.467.459.268 - 81.346.377.939}{97.467.459.268} = 65\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan 2020} = \frac{97.467.459.268 - 91.436.252.192}{97.467.459.268} = 62\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahawa rasio pertumbuhan pendapatan UPTD SAMSAT kabupaten sidrap tahun anggaran 2019 sebesar 62%, berdasarkan kreteria pengukuran pendapatan daerah, maka rasio pertumbuhan tahun anggara 2019 dapat dikategorikan kurang efektif, berbeda dengan tahun anggaran 2020 rasio pertumbuhan mengalami peningkatan menjadi 165% di kategorikan sangat efektif. Sedangkan pada tahun anggaran 2021 rasio pertumbuhan mengalami penurunan kembali dan di kategorikan kurang efektif.

Rekapitulasi Rasio Keuangan Daerah

Pada UPTD SAMSAT Kabupaten Sidrap

Tahun Anggaran 2019 – 2021

Tabel 4.8

Tahun	Rasio Kemandirian		Rasio Efektifitas		Rasio Pertumbuhan	
	Persen%	Kriteria	Persen%	Kriteria	Persen%	Kriteria
2019	92%	Efektif	102%	Sangat Efektif	62%	Kurang Efektif
2020	87%	Cukup Efektif	103%	Sangat Efektif	65%	Tidak Efektif
2021	78%	Kurang Efektif	96%	Efektif	62%	Kurang Efektif

4.3 Analisis Data

Dari hasil rekapulasi Rasio Diatas dapat diketahui rasio keuangan Daerah pada UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil perhitungan rasio maka diperoleh data sebagai berikut. Pada tahun 2019 rasio kemandirian keuangan daerah berada pada posisi atau hasil persentasenya sebesar 92%, dan tahun 2020

87%, dan tahun 2021 78%. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada gambar grafik.



Dari grafik tersebut maka bisa dilihat bahwa terjadi fluktuasi terjadi kenaikan dan penurunan dan dapat dilihat mulai dari tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan secara drastis mengenai kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud disini adalah rasio kemandirian kuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Dilihat dari rekapulasi rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2019 posisi keuangan 92% dan dikategorikan efektif , tahun 2020 posisi keuangan mengalami

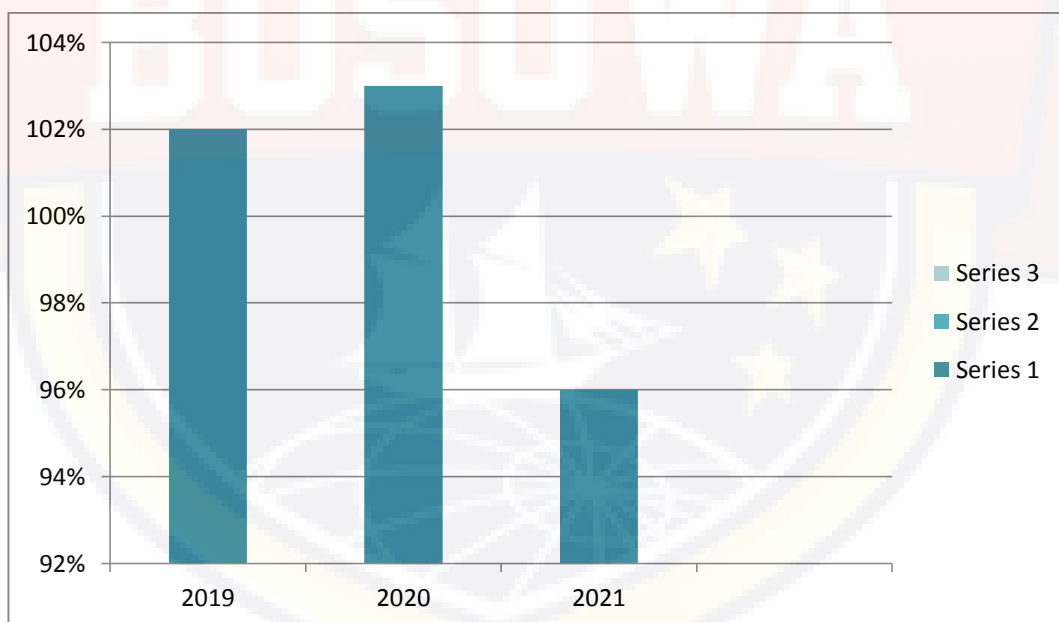
penurunan 87% dan dikategorikan cukup efektif, dan tahun 2021 posisi keuangan masih mengalami penurunan yaitu 78% dan dikategorikan kurang efektif.

b. Rasio Efektifitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio maka diperoleh data sebagai berikut pada tahun 2019 rasio efektifitas berada pada titik 102% , tahun 2020 mengalami kenaikan dan berada pada titik 103%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dan berada pada titik 96%. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada gambar grafik.

Grafik 4.1.2

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah



Dari grafik tersebut maka bisa dilihat bahwa terjadi fluktuasi, terjadi kenaikan dan penurunan dan dapat dilihat mulai dari tahun 2019 dan 2021 terjadi penurunan mengenai rasio efektifitas. Rasio efektifitas yang dimaksud disini

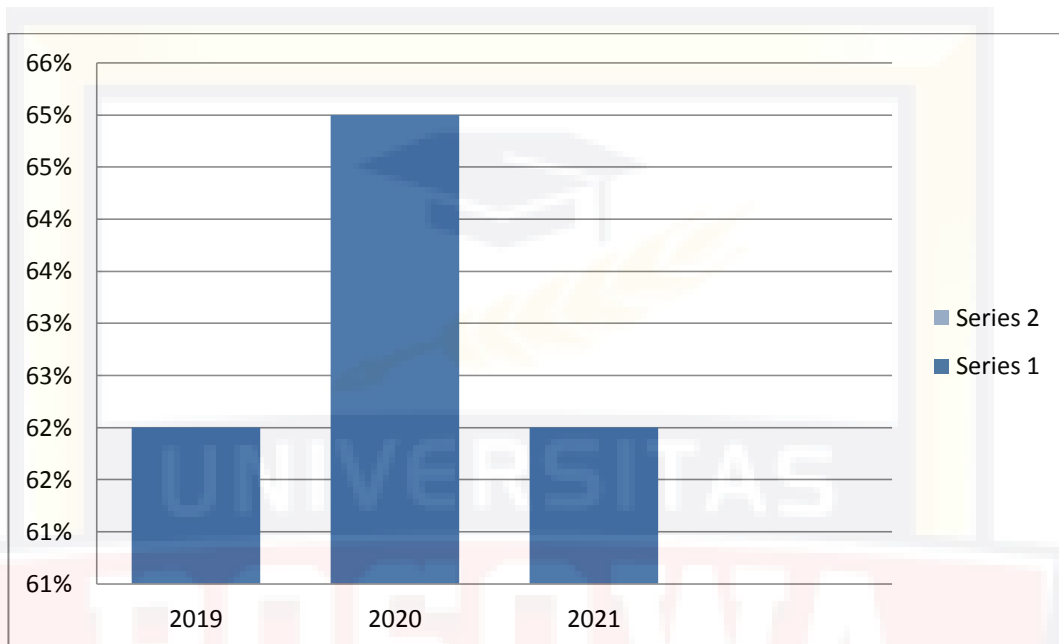
adalah rasio yang kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Dilihat dari rekapitulasi rasio efektifitas dari tahun 2019 posisi keuangan 102% dikategorikan sangat efektif, tahun 2020 posisi keuangan 96 mengalami kenaikan 103% dan dikategorikan sangat efektif dan di tahun 2021 posisi keuangan mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu 96% tetapi masih di kategorikan efektif.

c. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio maka diperoleh data sebagai berikut pada tahun 2019 rasio pertumbuhan berada pada titik 62%, tahun 2020 meningkat dan berada pada titik 65%, dan tahun 2021 mengalami penurunan kembali dan berada pada titik 62%. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada gambar grafik 5.3 dibawah ini.

Grafik 4.1.3

Rasio Pertumbuhan Keungan Daerah



Dari grafik tersebut maka dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi keanikan dan penurunan dan dapat dilihat melalui dari tahun 2019 dan 2021 mengalami penurunan mengenai rasio pertumbuhan. Yang dimaksud rasio pertumbuhan adalah semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dilihat dari rekapitulasi rasio pertumbuhan dari tahun 2019 posisi keuangan berada pada angka 62% dan dikategorikan kurang efektif, tahun 2020 posisi keuangan berada pada 65% dan di kategorikan tidak efektif, dan pada tahun 2021 posisi pertumbuhan keuangan mengalami penurunan kembali dan berada pada posisi 62%.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah pada UPTD SAMSAT Kabupaten Sidrap tahun 2019 – 2021 memperlihatkan penurunan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun ketahun. Hal ini berarti bahwa terdapat penurunan pada pendapatan asli daerah ini di sebabkan karena manurunnya pendapatan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pendapatan denda pajak.

2. Rasio efektifitas

Rasio efektifitas pajak daerah tahun 2019 – 2021 menunjukkan adanya perubahan yang berfluktuasi, sebagian besar rasio efektifitas termasuk kategori sangat efektif, kecuali tahun 2021 termasuk kategori efektif, hal ini disebabkan pajak daerah yang memiliki kontribusi yang besar pada pajak daerah tahun tersebut tidak terealisasi sesuai dengan yang telah di anggarkan oleh pemerintah daerah.

3. Rasio Pertumbuhan

Menurut uraian dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan tahun 2019 - 2021 UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap dapat digolongkan belum berhasil mempertahankan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja operasional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dari segi pendapatan asli daerah pada UPTD SAMSAT dapat dilihat dari tiga rasio berikut :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2019 sampai 2021 memiliki pola hubungan instruktif dimana tingkat ketergantungan pihak ekstem masih sangat tinggi yang meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pendapatan denda pajak.

2. Rasio efektifitas

Rasio efektivitas tahun anggaran 2019 dan 2020 memiliki kreteria sangat efektivitas sedangkan tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dan di kategorikan efektif. Artinya kemampuan UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap dalam menrealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan terget yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah efektif atau mencapai target.

3. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan kemampuan UPTD SAMSAT kabupaten

Sidrap dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan terbukti pada perhitungan rasio pertumbuhan. Namun ternyata UPTD SAMSAT belum mampu meningkatkan rasio pertumbuhan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan pada UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap, penulis memberikan saran agar UPTD SAMSAT kabupaten Sidrap lebih memaksimalkan lagi penagihan pajak yang merupakan salah satu indikator penurunan dalam hal kolektibilitas tagihan pajak. Sehingga sumber pendapatan daerah menjadi lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, I. d. (2015). Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan value for money pada pengadilan tebing tinggi. *jurnal riset akuntansi dan bisnis* , vol 15, no 1.

Fahmi. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hasibuan. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasnawati. (2019). Analisis kinerja keuangan badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan. program study akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar.

Hatauruk. (2017). *Akuntansi Perusahaan Jasa*. Jakarta: Indeks.

HSery.SE., M. (2015). *Prakris Menyusun Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.

irfandi, A. (2018). Analisis kinerja pegawai UPTD SAMSAT dalam memberikan pelayanan publik di kota Makassar. jurusan manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Martono, A. D. (2013). *Manajemen keuangan edisi kedua* . Yogyakarta: Ekonisa.

Mohammad Zain, H. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sudana, I. M. (2015). *Keuangan Perusahaan, Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.

Sutrisno. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana prenada media group.

Upt sidrap - bapenda sulse. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://bapendasulsel.web.id>

Wahyudiono, B. (2014). *Mudah Membaca Laporan Keuangan*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.